

**Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Nomor : P. 1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019**

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
2019**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
Gd. Manggala Wanabhakti, Blok I Lt. 7, Jl. Gatot Subroto
JAKARTA**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2019, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT.KEU.0/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 - 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2019 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program.
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5


Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,


ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Lampiran I.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan

Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

Tanggal : 24 Januari 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) di Tahun 2019.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2019 sebesar 78 point :	78 Point
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana Program; dan Penyusunan Rencana Anggaran, ▪ Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Pengelolaan Keuangan ▪ Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal ▪ Pengelolaan Kepegawaian ▪ Pelayanan Umum dan Perlengkapan ▪ Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 	7 Kegiatan 5 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 7 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 4 Kegiatan
		Layanan Internal (overhead)	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

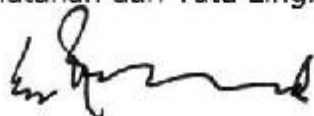
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggaran

Rp. 68.404.161.000,- (*Enam puluh delapan milyar empat ratus empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng
NIP. 19600411 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedia dan termutakhirkan-nya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi
2.	Tersedianya data dan informasi SDH Nasional pada KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan (Movev)	600 KPH
3.	Tersedianya informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam jaringan informasi geografis nasional	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
4.	Dukungan Manajemen Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : ▪ Layanan Perkantoran	1 Layanan

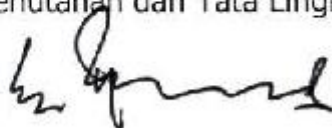
Kegiatan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Anggaran

Rp. 4.630.325.000,- (*Empat milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

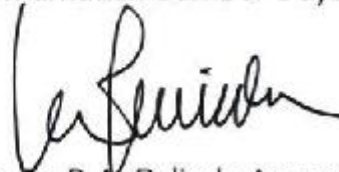
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2019

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M, M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Roosli Tjandrakirana, M.SE.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Roosli Tjandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN

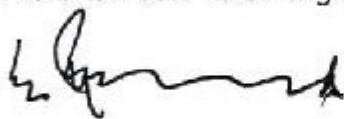
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 % (300 IPPKH)
2.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH (Update)
3.	Tersedianya/ter ^{update} nya peta arahan pemanfaatan hutan	Jumlah provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang ter ^{update} tiap tahun	34 Provinsi
4.	Terfasilitasinya penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dan Optimalnya penataan ruang kawasan hutan.	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
5.	Terselenggaranya perencanaan makro kawasan hutan mendukung KPH dan terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi/daerah	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (Update)
6.	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
7.	Terwujudnya penguatan kelembagaan untuk pengelolaan SDA berbasis masyarakat	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
8.	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi
9.	Terselesaikannya penyusunan RPHJP KPH	Fasilitasi penyusunan RPHJP (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15 Provinsi
10.	Seluruh KPH memiliki kelembagaan	Penguatan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan KPH	4 Propinsi

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
11.	Dukungan Manajemen Kegiatan Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan dan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Anggaran

Rp. 41.713.336.000,- (*Empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Rencana, Penggunaan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan,



Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan minimal sebesar 80% seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan (tahun 2019 sebesar 100%), (100.737.900 Ha)	10 % (tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2019)
2.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar
3.	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan peta TORA yang mutakhir	26 Provinsi
4.	Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Draft SK Menteri Tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan Yang Berlaku	100 %
5.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : ▪ Layanan Perkantoran	1 Layanan

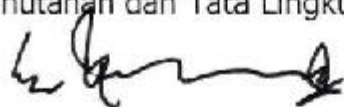
Kegiatan

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Anggaran

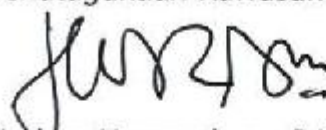
Rp. 9.985.215.000,- (*Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2019
Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
2.	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10 KLHS
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	15 KLHS
3.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 Kab/Kota
		Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 Satuan Peta
4.	Tersusnya rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen
5.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP dengan Nilai Minimal 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

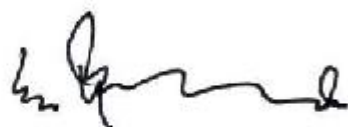
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Anggaran

Rp. 4.477.094.000,- (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100 % (50 Dokumen)
		Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	100 %
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	50 Lembaga/ Instansi
2.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Anggaran

Rp. 4.364.998.000,- (*Empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

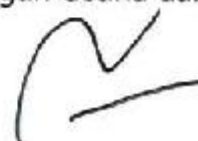
Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
NIP. 19620526 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.035 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 16.398.148.000,- (*Enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah I Medan,



Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
NIP. 19620526 198602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II
Palembang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	398 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

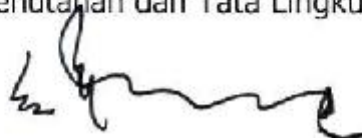
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 14.420.900.000,- (*Empat belas milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).

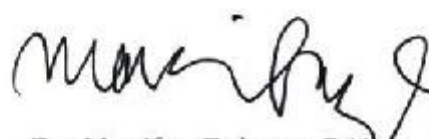
Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2019

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah II Palembang,



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19690805 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hasbi Afkar
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III
Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Hasbi Afkar
NIP. 19610316 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	5 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	274 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

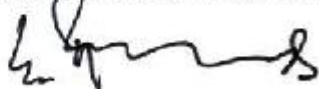
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 15.396.961.000,- (*Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah III Pontianak,



Ir. Hasbi Afkar
 NIP. 19610316 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tarticius Kustanto
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV
Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	857 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

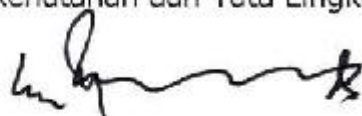
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 20.675.570.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah IV Samarinda,



Drs. Tarticus Kustanto
 NIP. 19640712 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Farhanah, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Farhanah, M.P.
NIP. 19610417 198903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJARBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	619 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 15.055.254.000,- (*Lima belas milyar lima puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah V Banjarbaru,



Ir. Farhanah, M.P.
 NIP. 19610417 198903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI
Manado

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	808 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

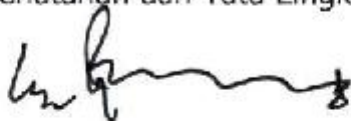
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 20.065.302.000,- (*Dua puluh milyar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VI Manado,



Dr. Fernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Syafri, MM
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII
Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Syafri, MM
NIP. 19631231 198903 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	8 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	520 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

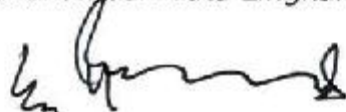
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 18.081.441.000,- (*Delapan belas milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah VII Makassar,



Ir. Syafri, MM
 NIP. 19631231 198903 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I. Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

I. Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
NIP. 19630824 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	56 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 10.029.974.000,- (*Sepuluh milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah VIII Denpasar,



I. Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
 NIP. 19630824 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, MSc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, M.Sc.
NIP. 19770314 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.295 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

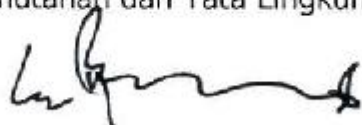
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 19.035.282.000,- (*Sembilan belas milyar tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah IX Ambon,



Zuhdan Arief F, S.Hut.,M.T, M.Sc.
 NIP. 19770314 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Arnold Manting
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X
Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	290 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

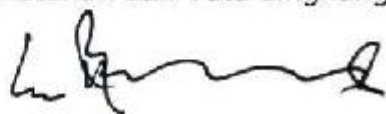
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 15.618.598.000,- (*Lima belas milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

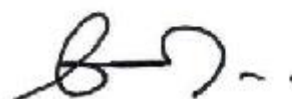
Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah X Jayapura,



Ir. Arnold Manting
 NIP. 19650430 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Heryadi, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	13 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	120 Km
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

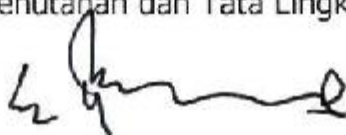
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 12.310.733.000,- (*Dua belas milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

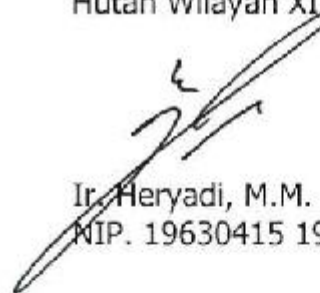
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2019

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XI Yogyakarta,



Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Tridjoko
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNG PINANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.006 Km
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

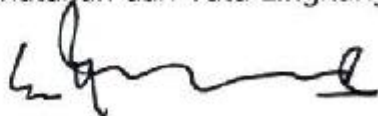
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 11.434.816.000,- (*Sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,



Ir. Tridjoko
 NIP. 19640403 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendro A. Basori, S.Hut.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkal Pinang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKAL PINANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	1 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	83 Km
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

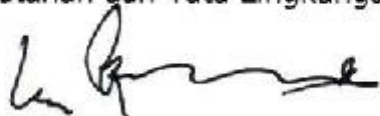
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 6.769.490.000,- (*Enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang,



Suhendro A. Basori, S.Hut.
 NIP. 19690416 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700405 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	177 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

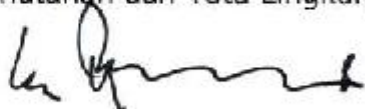
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 10.205.611.000,- (*Sepuluh milyar dua ratus lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XIV Kupang,



Dr. FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19700405 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV
Gorontalo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	594 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

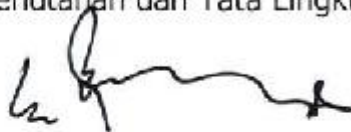
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 16.540.204.000,- (*Enam belas milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XV Gorontalo,



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	568 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 17.291.550.000,- (*Tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XVI Palu,



Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
 NIP. 19731011 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Willem Kayoi, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII
Manokwari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Willem Kayoi, S.H., M.Si.
NIP. 19620418 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	306 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

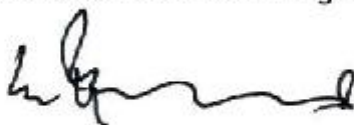
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 12.684.808.000,- (*Dua belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVII Manokwari,



Willem Kayoi, S.H., M.Si.
NIP. 19620418 199102 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Pjt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Sofyan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19771231 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	4 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	222 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

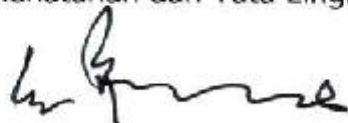
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 6.533.712.000,- (*Enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah*).

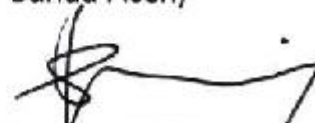
Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Plt. Kepala Balai Pemantapan
 Kawasan Hutan Wilayah XVIII
 Banda Aceh,



Sofyan, S.Hut., M.Sc.
 NIP. 19771231 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sigid Darussalam, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
Pekanbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Sigid Darussalam, M.P.
NIP. 19610409 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	4 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi kluster TSP/PSP	8 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	671 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

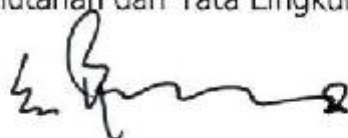
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 13.539.316.000,- (*Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

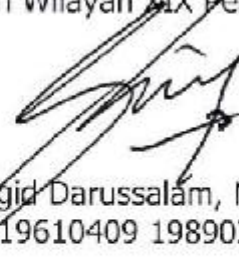
Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XIX Pekanbaru,



Ir. Sigid Darussalam, M.P.
 NIP. 19610409 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Subardja, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
Bandar Lampung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Subardja, M.Si.
NIP. 19610214 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	181 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 8.724.874.000,- (*Delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XX Bandar Lampung,



Ir. Subardja, M.Si
 NIP. 19610214 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Subagyo Widodo Putro, S.Ant., M.Sc.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Eko Subagyo W.P., S.Ant., M.Sc.
NIP. 19760421 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.003 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

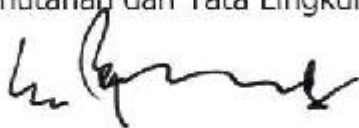
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 14.886.456.000,- (*Empat belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Pt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,



Eko Subagyo Widodo Putro, S.Ant., M.Sc.
 NIP. 19760421 2002 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Lontas Jonner Sirait
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII
Kendari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Lontas Jonner Sirait
NIP. 19620416 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	568 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan


Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 13.711.297.000,- (*Tiga belas milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XXII Kendari,



Ir. Lontas Jonner Sirait
 NIP. 19620416 198901 1 001

Lampiran II.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

Tanggal : 29 Januari 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....
NIP.

.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 Set/Dit/Bag/BPKH :

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Kegiatan

.....

.....

.....

NIP.

Anggaran

Rp.
 (.....

Jakarta, 2019

.....

.....

NIP.